

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP *INTERNET FINANCIAL REPORTING*  
(Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)**

**INFLUENCE OF REGIONAL WEALTH, COMMUNITY WELFARE, AND  
QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON  
*INTERNET FINANCIAL REPORTING*  
(Local Government on Sumatera Island for Fiscal Year 2019)**

**Mega Melati**

megamelati744@gmail.com

Universitas Negeri Padang

**Dian Fitria Handayani**

dian.fitria.h@fe.unp.ac.id

Universitas Negeri Padang

**ABSTRACT**

*This study aims to determine of the effect of regional wealth, level of public welfare, and quality of financial reports on Internet Financial Reporting (IFR) for Regency/City Governments on the island of Sumatera in the 2019 fiscal year. Internet Financial Reporting in this study was measured based on the availability of financial information in accordance with the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 188.52/1797/SJ 2012. This study used a purposive sampling technique, the sample in this study includes 130. Financial reports data and GRDP/per capita income were obtained through the official website of the BPK and BPS, while the IFR data was obtained through the website of each local government for the year 2019 and processed by multiple linear regression using SPSS. The results show that regional wealth has a significant positive effect on the implementation of Internet Financial Reporting. While the level of community welfare and quality of financial reports do not have effect on the implementation of Internet Financial Reporting. This paper gives a comprehensive literature survey on the effect of the regional wealth, level of public welfare, and quality of financial reports on the Internet Financial Reporting in regional government on the Island of Sumatera.*

**Keywords: Community Welfare, Internet Financial Reporting, Local Government, Regional Wealth, Quality of Financial Reports**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019. Pelaporan Keuangan Internet dalam penelitian ini diukur berdasarkan ketersediaan informasi keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ 2012. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini berjumlah 130 orang. Data laporan keuangan dan PDRB/pendapatan per kapita diperoleh melalui website resmi BPK dan BPS, sedangkan data IFR diperoleh melalui website masing-masing pemerintah daerah selama tahun 2019 dan diolah dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *Internet Financial Reporting*. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap implementasi *Internet Financial Reporting*. Tulisan ini memberikan kajian literatur yang komprehensif tentang pengaruh kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera.

**Kata Kunci: Kekayaan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Laporan Keuangan, Pelaporan Keuangan Internet, Pemerintah Daerah**

## 1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat cepat dan semakin canggih, hal ini mampu dibuktikan melalui pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan yang mampu menyediakan segala macam informasi. Jumlah pengguna internet juga mengalami peningkatan khususnya di Indonesia. Internet saat ini menjadi kebutuhan yang cukup penting, karena internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengetahuan, hiburan, kemudahan bisnis, komunikasi, serta pengaksesan informasi lainnya. Internet sudah banyak dimanfaatkan dalam dunia bisnis, contohnya banyak perusahaan yang melakukan penyampaian informasi akuntansinya melalui internet yang dikenal dengan *Internet Financial Reporting* (IFR). Perusahaan akan memperoleh berbagai macam manfaat ketika bersedia melakukan IFR, salah satunya penyebarluasan informasi keuangan melalui internet mampu menarik investor serta memberikan image yang positif bagi perusahaan (Wardani & K., 2011).

Sektor publik, khususnya pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum antusias dalam melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR) (Muhammad, 2012) menjelaskan bahwa masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum memanfaatkan penggunaan internet secara optimal khususnya dalam pelaporan keuangan. Publikasi informasi publik di internet, khususnya informasi akuntansi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Publikasi informasi publik di internet memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh serta mengakses informasi, sehingga mampu mencegah terjadinya korupsi atau *fraud* di sektor publik khususnya pemerintah daerah.

Internet adalah sumber dari berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Informasi yang tersedia di internet dapat diperoleh dengan cepat, murah, mudah serta tidak mengenal waktu dan batas wilayah. Tren pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak dapat terelakkan, sehingga pemerintah berupaya untuk mengimbangi hal tersebut salah satunya dengan menerapkan sistem *Electronic Government* (E-Government) atau pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Sistem tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adanya sistem tersebut, menjadikan sistem pemerintahan tradisional yang identik dengan *Paper Based Administration* atau pengerjaan secara manual yang boros waktu dan kertas mulai ditinggalkan.

Pemerintah sebagai badan yang melakukan investasi teknologi informasi berupa *e-government* menyadari pentingnya upaya dalam memuaskan kebutuhan informasi publik. Hal ini juga akan memunculkan tanda tanya bagi publik, apakah *e-government* yang dilaksanakan telah dimaksimalkan penggunaannya secara baik, bukan hanya pada tataran pemerintah daerah saja, namun optimalisasinya juga termasuk pada aspek keuangan atau akuntansi. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia hanya dengan menyampaikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) kepada DPRD sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, penyampaian informasi akuntansi atau keuangan kepada masyarakat hanya bersifat sukarela. Pemerintah seharusnya mampu menciptakan transparansi kepada masyarakat terutama dalam hal keuangan. Belum adanya regulasi yang tegas dalam keterbukaan informasi publik, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pejabat publik untuk transparan, bertanggungjawab, serta lebih mengutamakan pelayanan masyarakat. Adanya regulasi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melaporkan hasil kinerjanya terutama pada bidang keuangan kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab sosial dan transparansi informasi.

*Internet Financial Reporting* (IFR) atau publikasi laporan keuangan di internet merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, dengan begitu seluruh pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang

dibutuhkan. Pihak eksternal memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam hal pengawasan serta dukungan untuk menjamin terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Adanya pengawasan dari BPK, DPRD, masyarakat, serta pihak lainnya mampu mengarahkan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat. Pengawasan ini bermaksud untuk menjamin terlaksananya sebuah kegiatan sesuai dengan rencana yang akan dicapai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan begitu mampu menutup celah setiap penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan publik (*fraud*). Syahrudin dan Werry (2002), menjelaskan bahwa terdapat empat institusi yang mengawasi pelaksanaan APBD yaitu, DPRD selaku legislatif di daerah, SPI (Satuan Pengawas Internal), pengawas eksternal, serta menteri dalam negeri. Keberadaan lembaga pengawas tersebut menandakan pemerintah berkeinginan dalam menciptakan tata kelola yang baik yaitu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai azas *Good Governance*.

Salah satu wujud penerapan *e-government* pada pemerintah daerah yaitu dengan diterapkannya *Internet Financial Reporting (IFR)*. *E-government* diatur dalam Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan nasional pengembangan *e-government*. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah baik di daerah maupun di pusat harus membuat situs websitenya masing-masing guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem pelayanan melalui *e-government* cukup efisien dan fleksibel, karena pengaksesannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sejauh ini, pelaksanaan *e-government* melalui IFR belum berjalan optimal. Hal ini terjadi karena belum adanya sanksi tegas yang ditetapkan apabila hal tersebut tidak terlaksana, mengakibatkan pelaksanaan IFR masih berada pada pengungkapan yang bersifat sukarela.

Menurut (Trisnawati & Achmad, 2014), masih ada pemerintah daerah di Indonesia yang tidak mempublikasi laporan keuangannya secara lengkap setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan perbedaan kualitas informasi dan keuangan antara pemerintah daerah. Bentuk upaya dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan di internet, maka pemerintah pusat tahun 2012 mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah pada website resmi daerah. Namun, berdasarkan hasil survey Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran pada September 2013 menemukan bahwa mayoritas pemerintah daerah masih enggan untuk mempublikasikan pengelolaan anggarannya di website. Hal serupa juga diungkapkan oleh (Agustin, 2014) yang melakukan riset pada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat terkait publikasi pengelolaan anggaran di website, beliau mengungkapkan bahwa masih banyak pemda yang belum mewujudkan transparansi.

Martani dan Fitriyani (2014), dalam risetnya menyebutkan bahwa tingkat transparansi informasi kinerja dan keuangan pemda baru mencapai 15%, sedangkan untuk pengungkapan informasi berupa laporan kinerja, APBD, serta laporan keuangan masih dibawah 10%. Informasi mengenai kinerja dan keuangan sering kali diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk berita. (Puspita & Martani, 2012) menemukan bahwa informasi yang sering diungkapkan di website pemda masih seputar profil daerah, kependudukan perundang-undangan, dan timeliness. Sedangkan informasi terkait pembangunan, keuangan, pelayanan daerah belum menjadi prioritas utama. Konten utama/pokok yang harus disajikan oleh pemda yaitu berhubungan dengan transparansi keuangan. Konten tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan. Fenomena ini menarik untuk diteliti, melihat adanya kesenjangan harapan dari masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fakta yang menunjukkan bahwa pemda belum sepenuhnya berkomitmen menjalankan amanat dari

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, dalam menyediakan serta mengelola informasi yang berkualitas agar terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota yang terletak di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, karena pulau ini termasuk ke dalam salah satu daerah yang mendominasi kasus korupsi dengan rentang tahun 2001-2015 (Nisngsih, 2018). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR yang akan diuji dalam penelitian ini ada 3 yaitu, kekayaan daerah (diukur dengan pendapatan asli daerah), tingkat kesejahteraan masyarakat (diukur dengan PDRB/pendapatan per kapita), terakhir kualitas laporan keuangan diukur dari opini audit yang diberikan oleh BPK. Menurut (Styles & Tennyson, 2007) penelitian terkait pelaporan keuangan di internet khususnya pada pemerintah daerah di Indonesia masih sangat jarang, untuk itu penelitian terkait isu ini masih harus diteliti kembali untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### *Signalling Theory*

Teori *signaling* menjelaskan bahwa sektor publik terutama pemerintah daerah berusaha memberikan sinyal baik atau positif pada masyarakat terkait dengan kinerja yang telah dilakukan (Verawaty, 2015). Pemerintah yang diberikan amanat oleh masyarakat harus mampu bekerja secara transparan dan baik. Keterbukaan informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud melalui publikasi informasi keuangan berupa laporan keuangan melalui website resmi pemda. Menurut (Wilopo, 2017) dalam teori *signalling* pemerintah berperan sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principals*. Teori ini dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah yang diberi amanat oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan daerah dapat mengurangi asimetri informasi melalui pemberian sinyal positif dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas dan lengkap, serta meningkatkan sistem pengendalian internal. Internet menjadi salah satu media yang dapat dimanfaatkan pemda untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kinerja (Sofyani & Dwirama, 2019). Penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang diberikan oleh pemda kepada masyarakat, bahwa pemda telah melakukan kerjanya sesuai dengan amanat yang diberikan. Di samping itu, adanya IFR memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengawasi, mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memberikan dukungan, sehingga kinerja pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar.

### *Internet Financial Reporting (IFR)*

Verawaty (2015) menjelaskan bahwa sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas laporan keuangan yang dibuat dan dipublikasikan di internet disebut dengan *Internet Financial Reporting* (IFR). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat secara terstruktur dan sistematis yang berhubungan dengan segala jenis transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas. Laporan keuangan yang disajikan pemda bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur atas kinerja pemerintah daerah berhubungan dengan penggunaan kekayaan atau finansial daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Jenis laporan keuangan pada pemerintah daerah ada 7 yaitu Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengukuran IFR dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat ketersediaan informasi keuangan yang ada pada website masing-masing pemda sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 (Nosihana & Yaya, 2016). Berdasarkan instruksi tersebut ada 13 poin yang harus dipublikasikan oleh pemda yaitu ringkasan RKA-SKPD, ringkasan RKA-PPKD, rancangan perda APBD, rancangan perda perubahan APBD, perda APBD, perda perubahan APBD,

ringkasan DPA-SKPD, ringkasan DPA-PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini BPK, dan LAKIP.

### **Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap IFR**

(Nosihana & Yaya, 2016) menjelaskan bahwa kekayaan daerah dapat diukur dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan utama dari daerah itu sendiri, sehingga kekayaan daerah bisa diukur dari jumlah PAD yang didapat oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar secara sukarela bersedia mempublikasi laporan keuangannya di internet sebagai salah satu bentuk pemberian sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemda telah bekerja dengan baik. Lain halnya dengan pemda yang mempunyai kekayaan yang kecil, mereka akan enggan untuk mempublikasi laporan keuangannya karena takut akan mendapat kritikan dari masyarakat dan mendapat citra negatif. Berdasarkan hasil temuan (Sofyani & Dwirama, 2019) serta (Rahman & dkk, 2013), menjelaskan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR), sehingga berdasarkan hal tersebut hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR**

### **Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap IFR**

Wilopo (2017) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari PDRB/pendapatan per kapitanya. Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang besar cenderung akan memiliki kontrol/pengawasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berlevel ekonomi tinggi akan memaksimalkan penggunaan teknologi canggih terutama internet dalam mendapatkan informasi mengenai hasil kinerja serta prestasi dari pemerintahannya. (Hudoyo & Mahmud, 2014) serta (Wilopo, 2017) menemukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan PDRB/pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR. Dari uraian tersebut, hipotesis 2 yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

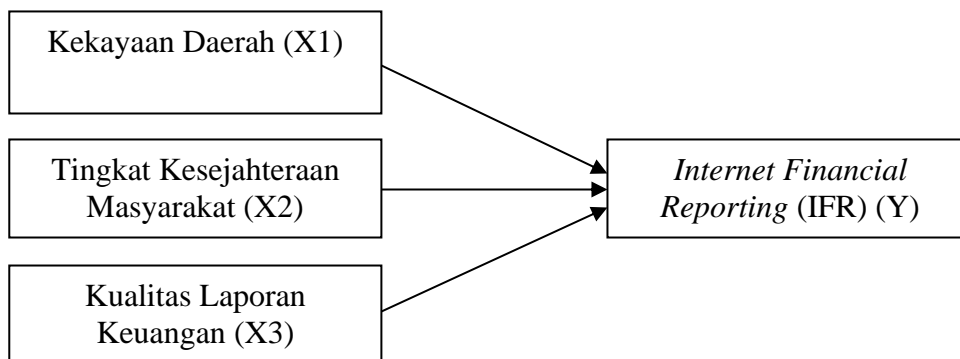
**H2: Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR**

### **Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap IFR**

Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari opini audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. (Styles & Tennyson, 2007), mengukur kualitas laporan keuangan dengan menggunakan *GFOA's Certificate of Achievement Program*, apabila diadopsi ke Indonesia sama dengan opini audit yang diberikan oleh BPK. Opini audit bisa mempengaruhi jumlah pengungkapan yang dilakukan oleh pemda di websitenya. (Trisnawati & Achmad, 2014) menjelaskan bahwa pemerintah yang mendapat opini WTP bersedia secara sukarela melakukan pengungkapan laporan keuangan di websitenya sebagai bentuk pemberian sinyal positif kepada masyarakat terkait kinerjanya. Namun, untuk pemda dengan opini selain WTP cenderung menghambat akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terutama mengenai laporan keuangan. Hal ini terjadi karena pemda takut akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan mendapat citra negatif dari masyarakat. (Sofyani & Dwirama, 2019) dalam risetnya menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 3 dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR**

Berikut merupakan rancangan model penelitian yang memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausatif, yaitu penelitian yang mencoba untuk melihat pengaruh atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Populasi dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Urutan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu: (1) Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, (2) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki website/situs resmi di internet serta bisa diakses. Sampel pada penelitian ini meliputi 130 Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas data kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas laporan keuangan, serta *Internet Financial Reporting (IFR)* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan PDRB/pendapatan per kapita periode 2019. Data LKPD dan PDRB/pendapatan per kapita diperoleh melalui website resmi BPD dan website resmi BPS, sedangkan data IFR diperoleh melalui website masing-masing pemda. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Alat statistik yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan bantuan *software SPSS*. Tahap-tahap pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Analisis statistik deskriptif, (2) Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, (3) Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ), (4) Uji hipotesis terdiri atas uji f dan uji t. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$IFR = \alpha + \beta_1KD + \beta_2TKM + \beta_3KLK + e$$

**Keterangan:**

- IFR : *Internet Financial Reporting*
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1KD$  : Kekayaan Daerah
- $\beta_2TKM$  : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
- $\beta_3KLK$  : Kualitas Laporan Keuangan
- $e$  : Error

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil

##### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data yang diteliti, dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), varian, serta standar deviasi (Ghozali, 2013). Berikut merupakan tabel hasil analisis statistik deskriptif:

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KD	130	10.27	12.60	11.0388	.37118
TKM	130	12.07	14.38	13.2094	.49023
KLK	130	0	1	.88	.321
IFR	130	.00	1.00	.1664	.24584
Valid N (listwise)	130				

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa kekayaan daerah memiliki nilai *maximum* sebesar 12,60, nilai *minimum* sebesar 10,27, nilai *mean* sebesar 11,0388, dan nilai standar deviasi sebesar 0,37118. Tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki nilai *maximum* sebesar 14,38, nilai *minimum* sebesar 12,07, nilai *mean* sebesar 13,2094, dan nilai standar deviasi sebesar 0,49023. Kualitas laporan keuangan memiliki nilai *maximum* sebesar 1, nilai *minimum* sebesar 0,00, nilai *mean* sebesar 0,1664, dan nilai standar deviasi sebesar 0,24584. Kesimpulannya, secara keseluruhan seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *mean* yang lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.

##### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.07217958
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		1.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.218

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Penelitian ini menggunakan metode *outlier* untuk memenuhi uji normalitas, dimana sampel awal pada penelitian ini ada 130, namun karena ada 40 sampel yang terindikasi outlier sehingga sampel penelitian menjadi 90 sampel. (Ghozali, 2013) menjelaskan bahwa data outlier merupakan karakteristik atau kasus unik data yang terlihat sangat beda jauh dengan observasi lainnya dan bentuk nilainya sangat ekstrim. Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan aturan uji normalitas ketika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, sehingga data penelitian ini memenuhi uji normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau variabel bebas.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	-.827	.333		-2.483	.015		
KD	.087	.035	.300	2.468	.016	.707	1.415
TKM	-.005	.020	-.031	-.252	.801	.695	1.438
KLK	.025	.025	.103	.976	.332	.938	1.066

a. Dependent Variabel: IFR

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF dan *tolerance* dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya nilai VIF yang diatas 10 dan tidak adanya nilai *tolerance* yang dibawah 0,10. Variabel KD menunjukkan nilai *tolerance* 0,707 dan nilai VIF 1,415. Variabel TKM menunjukkan nilai *tolerance* 0,695 dan nilai VIF 1,438. Variabel KLK menunjukkan nilai *tolerance* 0,938 dan nilai VIF 1,066.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.320 <sup>a</sup>	.102	.071	.07343	2.159

a. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM

b. Dependent Variable: IFR

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2.159. Menurut tabel Durbin Watson, data dengan jumlah sampel 90 ( $n = 90$ ), dan jumlah variabel bebas 3 ( $k = 3$ ), maka nilai  $DL = 1,5889$  dan  $DU = 1,7264$ . Nilai DW 2,159 lebih besar dari nilai DU yaitu 1,7264 dan kurang dari  $(4-du)$  yaitu 2,2736, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2013) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan residual dan *variance* antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas/ Uji White**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.287 <sup>a</sup>	.082	.050	.03528	1.837

a. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM

b. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS



Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,050. dengan adanya nilai *Adjusted R Square* maka kita bisa mengetahui nilai *Chi Square* hitung yaitu ( $n \times adjusted\ R\ square$ ), yaitu ( $90 \times 0,050 = 4,5$ ), sedangkan nilai *Chi Square* tabel yaitu 5,991. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Chi Square* hitung < *Chi Square* tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana model mampu dalam menerangkan variasi variabel terikat.

**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.320 <sup>a</sup>	.102	.071	.07343	2.159

a. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM

b. Dependent Variable: IFR

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,071 atau 7,1%, maksudnya 7,1% variabel dependen yaitu IFR dapat dijelaskan dari ketiga variabel independen yaitu kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya yaitu 92,9% ( $100\% - 7,1\%$ ), dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk pada penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji F (Uji Simultan)

Uji f dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen atau bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

**Tabel 7. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig.
1	Regression	.053	3	.018	3.266	.025 <sup>b</sup>
	Residual	.464	86	.005		
	Total	.517	89			

a. Dependent Variable: IFR

b. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diperoleh nilai signifikansi dari kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan secara simultan terhadap IFR yaitu  $0,025 < 0,05$ , sedangkan untuk nilai  $F_{hitung} 3,266 > F_{tabel} 2,71$ , dengan begitu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap IFR.

#### Uji T (Uji Partial)

Penelitian ini melakukan uji t dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen.

**Tabel 8. Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.827	.333		-2.483	.015		
KD	.087	.035	.300	2.468	.016	.707	1.415
TKM	-.005	.020	-.031	-.252	.801	.695	1.438
KLK	.025	.025	.103	.976	.332	.938	1.066

a. Dependent Variable: IFR

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diperoleh bahwa nilai Sig. untuk pengaruh kekayaan daerah terhadap IFR yaitu  $0,016 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,468 > t_{tabel} 1,98793$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif signifikan kekayaan daerah terhadap IFR. Nilai Sig. untuk pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap IFR yaitu  $0,801 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -0,252 < t_{tabel} -1,98793$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap IFR. Nilai Sig. untuk pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap IFR yaitu  $0,332 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} 1,98793$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas laporan keuangan terhadap IFR.

## Pembahasan

### Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap IFR

Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kekayaan daerah di suatu daerah, maka akan menambah jumlah pelaporan keuangan di internet oleh pemda. Hal ini sejalan dengan teori *signaling* yang menjelaskan bahwa pemerintah akan berusaha memberikan sinyal positif kepada masyarakat dengan cara mempublikasi laporan keuangan secara terbuka di internet bahwa pemerintah telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu pemerintah juga akan memperoleh citra positif dari masyarakat, karena telah bekerja sesuai harapan dan transparan.

### Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap IFR

Variabel tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Tinggi rendahnya PDRB/pendapatan per kapita masyarakat suatu daerah tidak akan menambah jumlah pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemda. Menurut (Hadianto & Murtin, 2020) menjelaskan bahwa asumsi masyarakat yang berpendapatan tinggi memiliki motivasi yang besar untuk mengakses laporan keuangan merupakan asumsi yang tidak sepenuhnya benar. Tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah merupakan sebuah fenomena ekonomi yang tidak ada kaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum menjadi alasan untuk diungkapkannya laporan keuangan oleh pemda di internet.

### Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap IFR

Variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. (Wilopo, 2017) menjelaskan bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah tidak dapat lagi hanya diukur melalui laporan keuangan yang diterbitkan, terutama dari opini

audit yang dikeluarkan oleh BPK. Ada beberapa kasus yang ditemukan terjadinya suap-menyuap terhadap aparat BPK hanya demi agar mendapat opini WTP (Nosihana & Yaya, 2016). Kasus tersebut membuktikan bahwa opini WTP tidak dapat lagi dipakai sebagai jaminan untuk kinerja dari pemda yang terbebas dari kecurangan atau tindak korupsi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa baik atau buruknya opini audit yang didapat oleh pemerintah daerah belum menjadi alasan utama untuk diungkapkannya informasi keuangan di internet.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Fiancial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, (2) tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, dan terakhir (3) kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) seperti kompetisi politik, rasio pembiayaan utang (*leverage*), ukuran pemda, dan tipe pemda. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan sampel selain Pulau Sumatera, kalau bisa seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia agar hasilnya lebih akurat. Terakhir penelitian selanjutnya agar menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, jangan hanya 1 tahun anggaran saja, guna mendapat hasil penelitian yang akurat.

## REFERENSI

- Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. FEB UNDIP. Semarang.
- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran Pada Website Pemkat/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- Almilia, L. S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial dan Sustainability Reporting. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12, (12).
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, A. T., & Nano, P. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2006). *Analisis Regresi*. Andi Yogyakarta.

- Hadianto, Y., & Murtin, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4, (2), 33-45.
- Hudoyo, Y., & Mahmud, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3, (4), 457-465.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Kebijakan dan Startegi Nsional pengembangan E-Government.
- Lazwad, F., dkk. (2005). *Determinants OF Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 101-121.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad, Bagus H. P. (2012). Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dalam Perspektif *E-Government* Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia.
- Nisngsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via *Website*. Universitas Negeri Padang.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3, (2), 89-104.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5165. Jakarta.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pmeda. Universitas Indonesia.
- Rahman, A., dkk. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan pemerintah No. 24. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14. Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretarian Negara.
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri No. 188/1797/SJ. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Sinaga, Y. F., & Tri, J. W. P. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Suakrela Oleh Pemerintah Daerah. Doctoral Dissrtation, Universitas Diponegoro.
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan Praktik Internet Reporting Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17, (2), 158-168.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibilty Of Financial Reporting Of U.S Municipalities On The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok.

- Verawaty. (2012). Analisis Komparasi Indeks *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Bina Darma.
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* Melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Wardani, A., K. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui internet (*Internet Financial Reporting*) Dalam Website Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wau, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widodo, D. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Radja Grafindo Persada.
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui *Website*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7, (1), 61-78.